

BAB V

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis pengaruh derajat desentralisasi fiskal penerimaan, variabel desentralisasi pengeluaran yaitu belanja tak langsung dan belanja langsung, Inflasi dan tenaga kerja sebagai variabel pendukung terhadap ketimpangan di enam provinsi di Pulau Jawa. Alat analisis yang digunakan adalah data panel dengan model analisis *Fixed Effect* dan diselesaikan melalui program software *E-Views 7.0*. Hasil-hasil pengolahan data disajikan dalam bab ini adalah hasil terbaik dalam memenuhi kriteria teori ekonomi, statistik, maupun ekonometrika. Hasil estimasi ini akan menjawab hipotesis yang sebelumnya telah diajukan dalam studi ini.

A. Uji Kualitas Data

1. Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedasitas memiliki arti dalam suatu model terdapat perbedaan varian residual atas observasi. Dalam model data yang baik seharusnya tidak terdapat heterokedasitas. Dalam uji ini, masalah muncul bersumber dari variasi data *cross section* yang digunakan, namun pada kenyataanya dalam data *cross sectional* yang meliputi unit heterogen, heterokedastisitas mungkin merupakan aturan daripada sebuah pengecualian.

Berdasarkan uji Heterokedastitas atau uji park. Nilai probalitas dari semua variabel independen tidak signifikan pada tingkat 10%. Keadaan tersebut akan menunjukkan adanya varian yang sama atau terjadi homoskedastisitas antara nilai-nilai variabel independen dengan residual setiap variabel itu sendiri. Dari uji yang dilakukan. berikut hasil pengujian heteroskedastisitas dengan menggunakan Uji Residual yang ditunjukkan pada **Tabel 5.1** berikut;

TABEL 5.1
UJI HETEROSKEDASTISITAS

Variabel	Koefisien	T-Statistik	Prob
C	-0.1993	-1.4578	0.1523
DF	0.0005	0.7493	0.4578
LOG(BTL)	-0.0190	-1.2002	0.2368
LOG(BL)	0.0248	2.1551	0.0369
INF	-0.0001	-0.0570	0.9548
LOG(TK)	0.0073	0.6565	0.5151

Sumber : Hasil olah data Eviews 7.0 (Lampiran ke- 6)

Dari tabel diatas. maka dapat disimpulkan bahwa dari kelima variabel bebas yang digunakan hanya terdapat satu yang terdapat masalah heterokedastisitas yaitu variabel BL atau Belanja langsung. Sedangkan keempat variabel bebas lainnya terbebas dari masalah heterokedastisitas (Gujarati, 2000).

2. Uji Multikolinieritas

Uji untuk mengetahui adanya multikolinieritas dilakukan dengan uji korelasi parsial antar variabel independen yang tersedia, yaitu dengan melakukan uji koefisien korelasi antar variabel independen. Jika suatu model tidak memiliki masalah

multikolinearitas antar variabel bebas dengan variabel terikatnya maka model tersebut dapat dikatakan sebagai model yang baik (Gujarati, 2000). Berikut hasil pengujian multikolinearitas ditunjukkan pada **Tabel 5.2** berikut ini;

TABEL 5.2
UJI MULTIKOLINEARITAS

	DF	LOG (BTL)	LOG (BL)	INF	LOG (TK)
DF	0.0013	-0.0012	0.0016	-0.0002	-0.0003
LOG(BTL)	-0.0012	0.0014	0.0023	0.0001	0.0003
LOG(BL)	0,0016	0.0023	0.0013	-1.7600	1.6700
INF	-0.0002	0.0001	-1.7600	0.0008	-0.0007
LOG(TK)	-0.0003	0.0003	1.6700	-0.0006	0.0009

Sumber : Hasil Pengolahan Eviews 7.0 (Lampiran Ke- 7)

B. Analisis Pemilihan Model

Dalam analisis model data panel terdapat tiga macam pendekatan yang digunakan. yaitu pendekatan kudarat terkecil (*Ordinary/ Pooled least square/ Common effect*). Pendekatan efek tetap (*fixed effect*) dan pendekatan efek acak (*random effect*). Pengujian statistik untuk memilih model pertama kali adalah dengan menggunakan uji chow untuk menentukan apakah menggunakan metode *common effect* atau *fixed effect*. Selanjutnya adalah uji Hausman, dalam uji ini akan diketahui apakah sebaiknya menggunakan *fixed effect* atau *random effects*.

Jika nilai F statistik dalam uji chow signifikan, maka selanjutnya dilakukan uji hausman. Jika hasil probabilitas kurang dari α maka nilai signifikan dalam uji hausman, maka artinya metode *fixed effect* yang dipilih untuk mengolah data panel.

1. Uji Chow

Uji Chow adalah uji yang dilakukan untuk menentukan model terbaik yang akan digunakan antara *common effect* dengan *fixed effect*. Jika hasil uji menunjukkan menerima hipotesis nol maka model yang digunakan adalah model *common effect*. sedangkan jika hasil menunjukkan meolak hipotesis nol maka model yang terbaik adalah model *fixed effect*. dan akan dilanjutkan dengan uji Hausmman.

TABEL 5.3
UJI CHOW

Effects Test	Statistic	d.f	Prob
Cross-Section F	34.390548	(5.37)	0.0000
Cross-Section Chi-square	83.097130	5	0,0000

Sumber : Hasil Pengolahan Eviews 7.0 (Lampiran ke-4)

Berdasarkan hasil Uji Chow diatas dapat diasumsikan kedua nilai Cross Section F dan Chi Square yang lebih kecil dari Alpha 0.1 sehingga menolak hipotesis nol. Maka berdasarkan hasil uji Chow. model terbaik yang digunakan adalah metode *Fixed Effect*. Selanjutnya data akan melalui uji Hausmann berdasar uji Chow yang menolak hipotesis nol.

2. Uji Hausman

Uji Hausman merupakan pengujian yang dilakukan untuk menentukan penggunaan metode antara *random effect* atau metode *fixed effect*. Jika hasil yang ditunjukkan oleh uji Hausman menyatakan bahwa menerima hipotesis nol maka model yang terbaik untuk

digunakan adalah model *random effect*. Sedangkan, jika hasilnya menyatakan bahwa menolak hipotesis nol maka model yang terbaik yang digunakan adalah *fixed effect*. Berikut hasil uji Hausman yang ditunjukkan oleh **Tabel 5.4**

TABEL 5.4
UJI HAUSMAN

Test summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. D.f.	Prob
Cross-section random	171.952742	5	0.0000

Sumber : Hasil Pengolahan Eviews 7.0 (Lampiran Ke- 5)

Berdasarkan tabel hasil uji diatas. nilai probabilitas pada *Cross-section random* adalah 0.000 yang lebih kecil dari Alpha 0.1 sehingga dapat disimpulkan hipotesis nol ditolak. Jadi menurut uji Hausman yang dilakukan. model yang terbaik yang digunakan adalah model dengan metode *Fixed Effect*.

C. Analisis Model Data Panel

Pemilihan model ini menggunakan uji analisis terbaik antara model Coomon Effect, Fixed Effect, dan Random Effect yang dijelaskan pada uraian **Tabel 5.5** berikut ini;

TABEL 5.5
HASIL ESTIMASI COMMON EFFECT, FIXED EFFECT DAN
RANDOM EFFECT

Variabel Dependent : (KT) Ketimpangan (Y)	Model		
	Common	Fixed	Random
Koefisien (C)	-1.670089	-2.950450	-1.670089
Standar error	0.298511	1.922157	0.133832
Prob	0.0000	0.1333	0.0000
t-statistik	-5.594729	-1.534968	-12.47896

	Common	Fixed	Random
(DF) Derajat Desentralisasi (X1)	-0.002209	-0.001493	-0.002209
Standar error	0.001361	1.922157	0.000610
Probabilitas	0.1121	0.0516	0.0008
t-statistik	-1.622669	-1.534968	-3.619339
(BTL) Belanja Tidak Langsung (X2)	-0.069255	-0.088737	-0.069255
Standar error	0.034575	0.022941	0.015501
Probabilitas	0.0517	0.0004	0.0001
t-statistik	-1.003038	-3.868092	-4.467748
(BL) Belanja Langsung (X3)	0.185410	0.059324	0,185410
Standar error	0.025151	0.023427	0,011276
Probabilitas	0.0000	0.0157	0,0000
t-statistik	7.371897	2.532364	16.44291
(INF) Inflasi (X4)	0.009359	0.004750	0,009359
Standar error	0.004324	0.002194	0,001939
Probabilitas	0.0362	0.0370	0,0000
t-statistik	2.164179	2.164354	4.827170
(TK) Tenaga Kerja (X5)	-0.041670	0.239878	-0.041670
Standar error	0.024248	0.239878	0.010871
Probabilitas	0.0931	0.0813	0.0004
t-statistik	-1.718456	1.792346	-3.832991
F-Statistik	28.16212	87.24947	28.16212
Prob (F-Stat)	0.000000	0.000000	0.000000
Durbin-Watson Stat	0.582298	1.572297	0.582298

Sumber : Hasil Pengolahan Eviews 7.0 (Lampiran Ke-1,2,3)

Berdasar uji spesifikasi model diatas. Dari kedua analisis yang dilakukan menggunakan uji chow dan uji hausman. Keduanya menyatakan untuk menggunakan *fixed effect model* dan dari perbandingan uji pemilihan terbaik maka model regresi yang digunakan adalah *fixed effect model*.

D. Hasil Estimasi Data Panel

Berdasarkan uji spesifikasi model yang telah dilakukan serta dari perbandingan nilai terbaik maka model regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Dalam pengujian sebetulnya, model telah lolos uji asumsi klasik, sehingga hasil yang didapatkan setelah estimasi konsisten dan tidak menunjukkan tanda bias. Berikut hasil estimasi data dengan jumlah observasi sebanyak enam provinsi selama periode 2008-2015 (8 Tahun).

TABEL 5.6
HASIL ESTIMASI MODEL FIXED EFFECT

Variabel dependent : (KT) Ketimpangan	Fixed Effect Model
Konstanta (C)	-2.950450
Standar error	1.922157
Probabilitas	0.1333
t-statistik	-1.534968
(DF) Derajat Desentralisasi (X1)	-0.001493
Standar error	1.922157
Probabilitas	0.0516
t-statistik	-1.534968
(BTL) Belanja Tidak Langsung (X2)	-0.088737
Standar error	0.022941
Probabilitas	0.0004
t-statistik	-3.868092
(BL) Belanja Langsung (X3)	0.059324

Standar error	0.023427
(BL) Belanja Langsung (X3)	Fixed Effect Model
Probabilitas	0.0157
t-statistik	2.532364
(INF) Inflasi (X4)	0.004750
Standar error	0.002194
Probabilitas	0.0370
t-statistik	2.164354
(TK) Tenaga Kerja (X5)	0.239878
Standar error	0.239878
Probabilitas	0.0813
t-statistik	1.792346
F-Statistik	87.24947
Prob (F-Stat)	0.000000
Durbin-Watson Stat	1.572297

Sumber : Hasil Pengolahan Eviews 7.0 (Lampiran Ke-2)

Dari hasil estimasi model diatas, maka selanjutnya dibuat model analisis data panel terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi Ketimpangan pada Provinsi di Pulau Jawa yang disimpulkan dengan persamaan berikut:

$$(Y) = f((X1), \text{LOG}(X2), \text{LOG}(X3), (X4), \text{LOG}(X5))$$

Yang diperoleh hasil persamaan regresi data panel sebagai berikut :

$$\text{Log}(Y) = \beta_0 - \beta_1*(X1) - \beta_2*\text{Log}(X2) + \beta_3*\text{Log}(X3) + \beta_4*(X4) + \beta_5 * \\ \text{Log}(X5) + \mu_{it}$$

$$\begin{aligned} \text{Log}(Y) = & - 2.95045049133 - 0.0014931388118*(X1) - \\ & 0.0887371618618 * \text{Log}(X2) + 0.059324447108*\text{Log}(X3) + \\ & 0.00474958107167*(X4) + 0.239877912576* \text{Log}(X5) + \mu_{it} \end{aligned}$$

Keterangan :

- Y = Ketimpangan (KT)
X1 = Derajat Desentralisasi Fiskal (DF)
X2 = Belanja Tidak Langsung (BTL)
X3 = Belanja Langsung (BL)
X4 = Inflasi (INF)
X5 = Tenaga Kerja (TK)
 β_0 = Konstanta
 $\beta_1 - \beta_5$ = Koefisien Parameter
 μ_{it} = Disturbance Error

Adapun hasil dari estimasi diatas, dapat di interpretasikan sebagai

berikut :

$$\begin{aligned} \text{KT_DKIJAKARTA} = & 0.432103773253(\text{efek wilayah}) - 2.95045049133 - \\ & 0.0014931388118*\text{DF_DKIJAKARTA} & - \\ & 0.0887371618618*\text{LOG}(\text{BTL_DKIJAKARTA}) & + \\ & 0.059324447108*\text{LOG}(\text{BL_DKIJAKARTA}) & + \\ & 0.00474958107167*\text{INF_DKIJAKARTA} & + \\ & 0.239877912576*\text{LOG}(\text{TK_DKIJAKARTA}) & \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{KT_JAWABARAT} = & -0.179558795503(\text{efek wilayah}) - 2.95045049133 \\ & -0.0014931388118*\text{DF_JAWABARAT} & - \\ & 0.0887371618618*\text{LOG}(\text{BTL_JAWABARAT}) & + \\ & 0.059324447108*\text{LOG}(\text{BL_JAWABARAT}) & + \\ & 0.00474958107167*\text{INF_JAWABARAT} & + \\ & 0.239877912576*\text{LOG}(\text{TK_JAWABARAT}) & \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{KT_JAWATENGAH} = & 0.187054539433(\text{efek wilayah}) - 2.95045049133 \\ & -0.0014931388118*\text{DF_JAWATENGAH} & - \\ & 0.0887371618618*\text{LOG}(\text{BTL_JAWATENGAH}) & + \\ & 0.059324447108*\text{LOG}(\text{BL_JAWATENGAH}) & + \end{aligned}$$

0.00474958107167*INF_JAWATENGAH	+
0.239877912576*LOG(TK_JAWATENGAH)	
KT_DIYOGYAKARTA=0.187669828053(efek wilayah)	-
2.95045049133-0.0014931388118*DF_DIYOGYAKARTA	-
0.0887371618618*LOG(BTL_DIYOGYAKARTA)	+
0.059324447108*LOG(BL_DIYOGYAKARTA)	+
0.00474958107167*INF_DIYOGYAKARTA	+
0.239877912576*LOG(TK_DIYOGYAKARTA)	
KT_JAWATIMUR = -0.272479870984(efek wilayah) - 2.95045049133	
-0.0014931388118*DF_JAWATIMUR	-
0.0887371618618*LOG(BTL_JAWATIMUR)	+
0.059324447108*LOG(BL_JAWATIMUR)	+
0.00474958107167*INF_JAWATIMUR	+
0.239877912576*LOG(TK_JAWATIMUR)	
KT_BANTEN = 0.0193196046142(efek wilayah) - 2.95045049133	-
0.0014931388118*DF_BANTEN	-
0.0887371618618*LOG(BTL_BANTEN)	+
0.059324447108*LOG(BL_BANTEN)	+
0.00474958107167*INF_BANTEN	+
0.239877912576*LOG(TK_BANTEN)	

(Lampiran Ke-8)

Keterangan :

- Y = Ketimpangan (KT)
- X1 = Derajat Desentralisasi Fiskal (DF)
- X2 = Belanja Tidak Langsung (BTL)
- X3 = Belanja Langsung (BL)
- X4 = Inflasi (INF)
- X5 = Tenaga Kerja (TK)

$\beta_0 = -2.95045049133$ artinya semua variabel independen dianggap konstan atau tidak mengalami perubahan maka ketimpangannya akan menjadi sebesar -2.95045049133 dengan asumsi Ketimpangan tetap.

$\beta_1 = -0.0014931388118$ artinya jika Derajat Desentralisasi Fiskal naik sebesar 1 persen maka ketimpangan akan turun sebesar -0.0014931388118, dengan asumsi Ketimpangan tetap.

$\beta_2 = -0.0887371618618$ artinya jika belanja tidak langsung naik sebesar 1(ribu) rupiah maka ketimpangan akan turun sebesar -0.0887371618618, dengan asumsi Ketimpangan tetap.

$\beta_3 = 0.059324447108$ artinya jika belanja langsung naik sebesar 1 (ribu) rupiah maka ketimpangan akan naik sebesar 0.059324447108, dengan asumsi Ketimpangan tetap

$\beta_4 = 0.00474958107167$ artinya jika inflasi naik sebesar 1 persen maka ketimpangan akan naik sebesar 0.00474958107167, dengan asumsi Ketimpangan tetap.

$\beta_5 = 0.239877912576$ artinya jika jumlah tenaga kerja naik sebesar 1 orang maka ketimpangan akan naik sebesar 0.239877912576, dengan asumsi Ketimpangan tetap.

Dalam model estimasi di atas, terlihat bahwa pengaruh *cross-section* yang berbeda di setiap Provinsi terhadap Ketimpangan. Dengan melihat data beberapa Provinsi memiliki *cross section* positif ada 3 Provinsi yaitu DKI Jakarta dengan nilai koefisien sebesar 0.432103773253, DI Yogyakarta dengan nilai koefisien 0.187669828053, dan Banten dengan nilai koefisien sebesar 0.0193196046142. sedangkan Provinsi yang memiliki pengaruh *cross-section* negatif adalah Provinsi Jawa Barat dengan nilai koefisien sebesar -0.179558795503, Jawa

Tengah dengan nilai koefisien sebesar -0.187054539433, dan Jawa Timur dengan nilai koefisien sebesar -0.272479870984.

E. Uji Statistik

1. Uji T

Untuk Mengetahui apakah variabel independen (Derajat Desentralisasi fiskal, Belanja Tidak Langsung, Belanja langsung, Inflasi, dan Tenaga kerja) mempunyai hubungan terhadap Ketimpangan, maka diperlukan uji statistik diantara lain :

Tabel 5.7

Hasil Uji T

Variabel	Koefisien Regresi	Prob	Standar Probabilitas
Derajat Desentralisasi Fiskal	-0,001493	0,0516	10%
Belanja Tidak langsung	-0,088737	0,0004	10%
Belanja Langsung	0,059324	0,0157	10%
Inflasi	0,004750	0,03750	10%
Tenaga Kerja	0,239878	0,0813	10%

Sumber : Hasil Pengolahan Eviews 7.0 (Lampiran Ke- 2)

a. Pengujian Variabel Derajat Desentralisasi Fiskal

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Derajat Desentralisasi Fiskal memiliki t-hitung sebesar -0,001493 dan memiliki nilai probailitas (t-statistik) sebesar $0,0516 < 0,10$ artinya variabel independen Derajat Desentralisasi

fiskal secara individu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Ketimpangan di Pulau Jawa

b. Pengujian Variabel Belanja Tidak Langsung

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Belanja Tidak langsung memiliki t-hitung sebesar $-0,088737$ dan memiliki nilai probabilitas (t-statistik) sebesar $0,0004 < 0,10$ artinya variabel independen Belanja Tidak Langsung secara individu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Ketimpangan di Pulau Jawa.

c. Pengujian Variabel Belanja Langsung

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Belanja Langsung memiliki t-hitung sebesar $0,059324$ dan memiliki nilai probabilitas (t-statistik) sebesar $0,0157 < 0,10$ artinya variabel independen Belanja Langsung secara individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketimpangan di Pulau Jawa

d. Pengujian Variabel Inflasi

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Inflasi memiliki t-hitung sebesar $0,004750$ dan memiliki nilai probabilitas (t-statistik) sebesar $0,0379 < 0,10$ artinya variabel independen Inflasi secara individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketimpangan di Pulau Jawa

e. Pengujian Variabel Tenaga kerja

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Tenaga Kerja memiliki t-hitung sebesar -0,001493 dan memiliki nilai probabilitas (t-statistik) sebesar $0,0813 < 0,10$ artinya variabel independen Tenaga Kerja secara individu pengaruh Positif dan signifikan terhadap Ketimpangan di Pulau Jawa

2. Uji F

Uji F digunakan untuk signifikansi pengaruh pengaruh variabel independen terhadap variabel dependent secara keseluruhan. Berdasarkan hasil analisis menggunakan software *E-Views 7.0*, nilai probabilitas F diperoleh sebesar 0,00000 dengan ketentuan $\alpha = 10\%$, maka uji F signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Variabel Derajat Desentralisasi Fiskal, Belanja tidak langsung, belanja langsung, inflasi, dan tenaga kerja secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan di Pulau Jawa.

3. R-Squared

Nilai R-Squared atau koefisien determinasi berguna untuk mengukur kemampuan model dalam menerangkan himpunan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi ditunjukkan dengan angka 0 sampai 1. Nilai koefisien determinasi yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam variasi variabel dependen amat terbatas.

Sedangkan nilai dengan mendekati nilai 1 berarti variabel-variabel independen tersebut memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Dari hasil olah data dengan menggunakan *Fived Effect Model* diperoleh Nilai R-Squared sebesar 0,959318, artinya sebesar 95,9318% dari variabel independent (Derajat Desentralisasi Fiskal, Belanja tidak langsung, belanja langsung, inflasi, dan tenaga kerja) mempengaruhi Ketimpangan dan sisanya sebanyak 4,0682% dipengaruhi oleh variabel independen lain di luar penelitian ini.

F. Uji Teori (Interpretasi Ekonomi)

Berdasarkan hasil penelitian atau estimasi model diatas maka dapat dibuat suatu analisis dan pembahasan mengenai pengaruh variabel independen (Derajat desentralisasi fiskal, belanja tidak langsung, belanja langsung, inflasi, dan tenaga kerja) terhadap Ketimpangan pada keenam Provinsi di Pulau Jawa yang di interpretasikan sebagai berikut :

1. Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal terhadap Ketimpangan

Derajat desentralisasi dari sisi penerimaan ini dilihat dari jumlah Pendapatan Asli Daerah dan Total pendapatan Daerah Provinsi. Tingkat kemandirian daerah dalam mngelola keuangan daerah dapat dilihat dari data derajat ini. Desentralisasi dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja ekonomi dan pemerataan ekonomi pada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, X1 (Derajat Desentralisasi) menunjukkan hubungan negatif dan berpengaruh signifikan secara statistik pada derajat kepercayaan 10% untuk keenam Provinsi di Pulau Jawa. Variabel desentralisasi fiskal mempunyai koefisien negatif yang berarti anatar variabel desentralisasi fiskal dengan ketimpangan mempunyai hubungan negatif. Koefisien derajat desentralisasi mempunyai nilai sebesar -0,001493 yang berarti apabila terjadi kenaikan derajat desentralisasi sebesar 1% sedangkan variabel lain tetap maka ada perubahan dalam variabel dependen yaitu KT (Ketimpangan) akan menurun sebesar -0,001493% *vice versa*.

Dalam penelitian ini terlihat hubungan desentralisasi fiskal bernilai negatif terhadap Ketimpangan, diartikan bahwa ketika variabel yang berada di sisi kanan model atau sebagai variabel independen mengalami kenaikan/ penurunan, maka variabel pada ruas kiri akan berlawanan mengikuti ke arah penurunan/kenaikan. Dalam hal ini terlihat bahwa ternyata desentralisasi fiskal mempengaruhi Ketimpangan di enam Provinsi di Pulau Jawa.

Sehingga hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian sebelumnya milik Rosdyana (2015) bahwa desentralisasi berpengaruh positif dan tidak signifikan dengan ketimpangan. Sedangkan menurut Teori yang dibentuk bahwa adanya desentralisasi fiskal untuk membentuk kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pada masyarakat. Teori tersebut mendasari dibentuknya hipotesis bahwa

desentralisasi diduga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan. Sehingga penelitian ini menerima hipotesis dan menyatakan bahwa “Desentralisasi Fiskal berpengaruh Negatif dan Signifikan terhadap Ketimpangan pada enam Provinsi di wilayah Pulau Jawa “

2. Pengaruh Belanja Tidak langsung terhadap Ketimpangan

Derdasarkan hasil penelitian, X₂ (Belanja tidak langsung) menunjukkan hubungan negatif dan signifikan secara statistik pada derajat kepercayaan 10% untuk keenam Provinsi di Pulau Jawa. Variabel Belanja tidak langsung mempunyai koefisien negatif yang berarti antara variabel belanja tidak langsung dengan ketimpangan memiliki hubungan negatif. Koefisien belanja tidak langsung mempunyai nilai sebesar -0,088737 yang berarti apabila terjadi kenaikan belanja tidak langsung sebesar 1000 rupiah sedangkan variabel lain tetap maka ada perubahan dalam variabel dependen yaitu KT (Ketimpangan) akan menurun sebesar -0,088737 % *vice versa*.

Dalam penelitian ini terlihat hubungan belanja tidak langsung bernilai negatif terhadap Ketimpangan, diartikan bahwa ketika variabel yang berada di sisi kanan model atau sebagai variabeli ndependen mengalami kenaikan/ penurunan, maka variabel pada ruas kiri akan berlawanan mengikuti ke arah penurunan/kenaikan. Dalam hal ini terlihat bahwa ternyata belanja tidak langsung mempengaruhi Ketimpangan di enam Provinsi di Pulau Jawa.

Dalam penelitian sebelumnya milik Rodriguez-Pose dan Ezcurra (2009) menyatakan bahwa belanja pengeluaran pada negara berkembang berkorelasi positif dan signifikan terhadap disparitas pendapatan nasional. Penelitian tersebut mendasari hipotesis yang menduga bahwa hubungan belanja tidak langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan. Sehingga hasil penelitian ini menerima hipotesa dan menyatakan bahwa variabel “Belanja tidak Langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan”

3. Pengaruh Belanja Langsung Terhadap Ketimpangan

Berdasarkan hasil penelitian, X_3 (Belanja Langsung) menunjukkan hubungan positif dan signifikan secara statistik pada derajat kepercayaan 10% untuk enam Provinsi di Pulau Jawa. Variabel Belanja Langsung mempunyai koefisien positif yang berarti bahwa hubungan antara belanja langsung dengan ketimpangan memiliki hubungan positif. Koefisien Belanja Langsung mempunyai nilai sebesar 0,05932 yang berarti apabila terjadi kenaikan nilai belanja langsung sebesar 1000 Rupiah sedangkan variabel lain tetap maka ada perubahan dalam jumlah variabel dependen yaitu KT (Ketimpangan) akan meningkat sebesar 0,05932% *vice versa*.

Dalam penelitian ini terlihat hubungan belanja langsung bernilai positif terhadap Ketimpangan, diartikan bahwa ketika variabel yang berada di sisi kanan model atau sebagai variabel independen mengalami kenaikan/ penurunan, maka variabel pada ruas kiri akan

mengikuti ke arah yang sama yaitu kenaikan/penurunan. Dalam hal ini terlihat bahwa ternyata belanja langsung mempengaruhi Ketimpangan di enam provinsi di Pulau Jawa.

Dalam penelitian sebelumnya (Nurman, 2009) menjelaskan bahwa belanja langsung pemerintah daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Ketimpangan pendapatan regional. Penelitian tersebut mendasari hipotesis yang menduga bahwa hubungan belanja langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan. Sehingga hasil penelitian ini menolak hipotesa dan menyatakan bahwa variabel “Belanja Langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan”

4. Pengaruh Inflasi terhadap Ketimpangan

Berdasarkan hasil penelitian, X4 (Inflasi) menunjukkan hubungan positif dan signifikan secara statistik pada derajat kepercayaan 10% untuk enam provinsi di Pulau Jawa. Variabel Inflasi mempunyai koefisien positif yang berarti bahwa hubungan antara inflasi dengan Ketimpangan memiliki hubungan positif. Koefisien Inflasi mempunyai nilai sebesar 0,004749 yang berarti apabila terjadi kenaikan nilai inflasi sebesar 1% sedangkan variabel lain tetap maka ada perubahan dalam jumlah variabel dependen yaitu KT (Ketimpangan) akan meningkat sebesar 0,004749% *vice versa*.

Dalam penelitian ini terlihat hubungan inflasi bernilai positif terhadap Ketimpangan, diartikan bahwa ketika variabel yang berada di

sisi kanan model atau sebagai variabel independen mengalami kenaikan/ penurunan, maka variabel pada ruas kiri akan mengikuti ke arah yang sama yaitu kenaikan/penurunan. Dalam hal ini terlihat bahwa ternyata inflasi mempengaruhi Ketimpangan di enam provinsi di Pulau Jawa.

Hipotesis yang menduga bahwa hubungan Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan dapat diterima, Sehingga hasil penelitian ini menerima hipotesa dan menyatakan bahwa variabel “Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan”

5. Pengaruh Tenaga Kerja terhadap Ketimpangan

Berdasarkan hasil penelitian, X5 (Tenaga Kerja) menunjukkan hubungan positif dan tidak signifikan secara statistik pada derajat kepercayaan 10% untuk enam Provinsi di Pulau Jawa. Variabel tenaga kerja mempunyai koefisien positif yang berarti bahwa hubungan antara tenaga kerja dengan Ketimpangan memiliki hubungan positif secara signifikan. Koefisien Inflasi mempunyai nilai sebesar 0,23988 yang berarti apabila terjadi kenaikan nilai tenaga kerja sebesar 1 jiwa sedangkan variabel lain tetap maka ada perubahan dalam jumlah variabel dependen yaitu KT (Ketimpangan) akan meningkat sebesar 0,23988 % *vice versa*.

Dalam penelitian ini terlihat hubungan tenaga kerja bernilai positif terhadap Ketimpangan, diartikan bahwa ketika variabel yang berada di sisi kanan model atau sebagai variabel independen

mengalami kenaikan/ penurunan, maka variabel pada ruas kiri akan mengikuti ke arah yang sama yaitu kenaikan/penurunan. Dalam hal ini terlihat bahwa ternyata tenaga kerja tidak secara signifikan mempengaruhi Ketimpangan di enam Provinsi di Pulau Jawa.

Menurut penelitian (Dewi Rosdyana, 2015) tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Secara teori adanya tenaga kerja yang besar, akan meningkatkan pendapatan masyarakat dalam PDRB, secara langsung hal ini dapat meningkatkan PDRB per kapita yang menyebabkan penurunan ketimpangan. Hal ini mendasari pembentukan hipotesis yang menduga bahwa hubungan tenaga kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan dapat diterima, Sehingga hasil penelitian ini menolak hipotesa dan menyatakan bahwa variabel “Tenaga Kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Ketimpangan”

G. Implikasi

Pada sub bab ini akan dijelaskan dampak yang ditimbulkan masing-masing variabel terhadap ketimpangan dengan memperhatikan fokus pada solusi yang bisa Pemerintah daerah lakukan dalam usaha memperkecil angka ketimpangan di Provinsi Provinsi di Pulau Jawa.

1. Desentralisasi Fiskal

Dalam derajat desentralisasi fiskal sisi penerimaan yang dilihat dari rasio PAD dan TPD ini melihat bagaimana kemampuan pemerintah daerah dalam mengalokasi dan mengelola potensi

keuangan yang dimiliki dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan dan pendapatan masyarakat di daerah tersebut. Semakin tinggi derajat desentralisasi fiskal daerah tersebut maka akan semakin tinggi pula tingkat keberhasilan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola potensi keuangan daerah yang dimiliki.

Keenam Provinsi di Pulau Jawa, saat ini sudah memiliki angka derajat desentralisasi fiskal yang tinggi, hal ini menandakan kemampuan untuk mengelola keuangan daerah mereka sudah sangat baik dan secara merata pada keenam Provinsi. Pulau Jawa yang memiliki potensi yang kaya baik dari segi sumber daya manusia seharusnya lebih menggali kembali potensi SDM sehingga pendapatan daerah akan semakin tinggi. Selain potensi SDM, potensi lain seperti industri dengan padat karya sangat bisa dikembangkan mengingat salah satu potensi alam seperti pertanian dan perkebunan di Pulau Jawa sekarang sudah mulai berkurang, sehingga potensi dari bidang industri akan meningkatkan pendapatan daerah.

2. Pengeluaran Belanja Langsung Dan Tidak Langsung Pemerintah

Pengeluaran belanja pemerintah yang termasuk dalam desentralisasi pengeluaran, dibagi menjadi dua yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung memiliki hubungan yang berbeda dengan ketimpangan dan terjadi signifikan antar hubungan ketiganya. Belanja tidak langsung yang terdiri belanja pegawai, belanja bunga, belanja

subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan pengeluaran tidak terduga memiliki hubungan negatif dimana jika belanja tidak langsung mengalami kenaikan, maka ketimpangan akan menurun. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu komponen dalam belanja tidak langsung secara signifikan membuat ketimpangan menurun.

Sementara itu, pengeluaran belanja langsung secara positif mempengaruhi ketimpangan. Hal ini menunjukkan bahwa jika belanja langsung meningkat maka ketimpangan akan meningkat. Belanja langsung yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal memiliki dampak dalam ketimpangan. Jika salah satu komponen belanja langsung meningkat maka secara signifikan angka ketimpangan akan naik.

Pemerintah daerah dapat melakukan kebijakan dimana alokasi belanja tidak langsung akan memberi dampak agar ketimpangan menurun seperti pada komponen belanja subsidi maupun belanja bagi hasil. Dalam belanja ini agar lebih meningkatkan belanja pada proyek-proyek padat karya yang juga memberdayakan tenaga kerja bukan hanya dalam belanja dalam hal padat modal dan juga nantinya akan meningkatkan pendapatan dalam daerah sekaligus mengurangi angka pengangguran yang secara tidak langsung akan menurunkan ketimpangan.

3. Inflasi

Pengaruh inflasi dalam ketimpangan berdampak positif, dalam hal ini inflasi diketahui mempengaruhi PDRB yang merupakan komponen rasio dari angka ketimpangan. Inflasi yang terbentuk di pasar pada masing-masing daerah mempengaruhi daya beli masyarakat. Dalam hal ini jika inflasi naik masyarakat akan mengurangi konsumsi dan menurunkan pendapatan perkapita provinsi. Untuk itu, pemerintah daerah bisa melakukan cara untuk menurunkan inflasi jika angka inflasi dinilai sudah terlalu tinggi. Seperti dengan melakukan kebijakan fiskal operasi pasar terbuka pada saat angka inflasi sudah dirasa melebihi batas.

Efek terhadap Pendapatan (*Equity Effect*) memiliki sifat yang tidak merata, memiliki efek merugikan namun ada pula yang diuntungkan dengan adanya inflasi. Dalam hal ini misalnya, jika individu menyimpan kekayaan dalam bentuk uang kas, inflasi ini akan merugikan individu tersebut. Lain halnya dengan pihak yang mendapat keuntungan dengan kenaikan pendapatan karena kenaikan persentase kenaikan inflasi. Hal ini dapat disimpulkan bahwa inflasi dapat menyebabkan perubahan pola distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat dalam bentuk tertentu.

Di dalam efek inflasi terhadap efisiensi, inflasi dapat mengubah pola alokasi faktor-faktor produksi. Perubahan bisa dalam berbagai

bentuk, diantaranya dalam kenaikan permintaan barang atau jasa yang kemudian akan mendorong jumlah produksi. Kenaikan jumlah produksi barang tertentu akan menimbulkan efek domino dimana barang lain juga akan mengalami kenaikan permintaan dan akan menyebabkan kenaikan produksi pula.

Menurut penelitian (Sasetya, 2005) inflasi memiliki hubungan kausalitas satu arah dengan distribusi pendapatan yang dimana akan mengakibatkan ketimpangan yang ditunjukkan pada indeks gini. Sementara dalam penelitian lain belum ditemukan pengaruh signifikan langsung antara inflasi dengan ketimpangan pendapatan.

4. Tenaga Kerja

Pengaruh tenaga kerja dalam ketimpangan berdampak positif, hal ini berlawanan dengan teori fungsi produksi Neo-klasik yang dimana tenaga kerja mempengaruhi pertumbuhan produksi dimana peningkatan marginal jumlah tenaga kerja mempengaruhi produksi. Hal ini dapat dimungkinkan disebabkan oleh rendahnya kualitas dari tenaga kerja sehingga penggunaan tenaga kerja yang tidak maksimal berakibat pada semakin banyak tenaga kerja yang ada malah membuat upah tenaga kerja itu sendiri juga semakin rendah. Karena rendahnya upah dari tenaga kerja yang mayoritas memiliki skill yang tidak memadai berdampak pada pendapatan perkapita yang ikut rendah dan secara rasio akan mempengaruhi ketimpangan.

Pulau Jawa memiliki jumlah penduduk yang banyak, hal ini yang menyebabkan jumlah tenaga kerja di pulau Jawa juga banyak sedangkan pulau Jawa adalah salah satu pulau dengan predikat pulau dengan sarana prasarana yang paling memadai dengan Ibu Kota DKI Jakarta yang juga berada di pulau Jawa. Hal ini terdapat daya tarik tersendiri bagi tenaga kerja dari daerah lain diluar Jawa untuk datang ke Pulau Jawa. Hal ini menyebabkan jumlah tenaga kerja di Pulau Jawa melimpah. Dengan faktor adanya distribusi pendapatan yang tidak merata antar tenaga kerja, hal ini adalah salah satu faktor utama tidak meratanya angka pendapatan masyarakat walaupun jumlah pendapatan perkapita masyarakat tinggi.

Dalam penelitian ini, variabel tenaga kerja menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap ketimpangan sehingga, variabel tenaga kerja tidak valid dalam pengaruhnya dalam ketimpangan karena tidak memenuhi hipotesa yang telah dibentuk.